



JURNAL

**EVALUASI TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM
DI KAWASAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG**

Oleh:

Syaffa Rahmah

14010112130105

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2016

EVALUASI TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KAWASAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG

ABSTRAK

Penelitian membahas tentang Evaluasi terhadap pengelolaan parkir di kawasan Simpang Lima Semarang dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan dan peningkatan penerimaan daerah dari sektor parkir. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan parkir di lapangan dengan turut serta mengidentifikasi peran-peran pihak yang terlibat dan menguraikan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengelolaan parkir di kawasan Simpang Lima Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Pemerintahan menurut Samuel E. Overman mengenai penerapan fungsi manajemen dengan paradigma manajemen publik yang baru dimana diartikan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *Planning*, *Organizing*, dan *Controlling* di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode campuran, dimana metode kualitatif lebih dominan dari kuantitatif. Penelitian ini menggunakan studi kasus jenis deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dishubkominfo, Komisi B DPRD Kota Semarang, dan Juru Parkir sebagai pelaksana parkir di lapangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan kebijakan parkir telah dilakukan dengan baik oleh Dishubkominfo dimana pengelolaan parkir tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum dan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi parkir. Namun dalam pengelolaan di lapangan menemui hambatan dalam hal sosialisasi yang kurang diberikan, perilaku para juru parkir yang tidak tertib, dan adanya hambatan kepentingan dari koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir. Pada akhirnya pengelolaan parkir yang tidak efektif di lapangan berdampak pada serapan penerimaan daerah dari sektor parkir yang dibuktikan dengan tidak pernah tercapainya target realisasi anggaran retribusi parkir tepi jalan umum.

Akhirnya dengan penelitian ini diharapkan adanya perbaikan pengelolaan parkir tepi jalan umum guna tercapainya ketertiban dan tercapainya penerimaan daerah dari sektor parkir.

Kata Kunci: Pengelolaan Parkir, Ketertiban, Penerimaan Daerah.

EVALUATION OF MANAGEMENT PUBLIC STREET PARKING IN THE AREA OF SIMPANG LIMA SEMARANG

ABSTRACT

The research discusses evaluation of management parking in Simpang Lima Semarang in order to improve effectiveness of management and reception area of parking lot. This research aims to identify implementation of management of the parking in field with participation identifying roles parties involved and outlining barriers encountered in the management of parking in area of Simpang Lima Semarang.

This research uses theories of Government Management according to Samuel e. Overman about application of management functions with new public management paradigm which mean that public management is interdisciplinary study of the general aspects of the Organization and is combination of management functions such as Planning, Organizing, and Controlling Department on one side, with the human resources, financial, physical, informational, and politics on the other. The methods used in this study i.e., mixed methods, in which qualitative methods are more dominant than quantitative. This research uses descriptive type of case studies that attempt to describe a symptom in the field. With techniques of data collection in the form of interviews, observation or observation and documentation. Informants in this study was Dishubkominfo, Commission B DPRD Kota Semarang, and implementing as parking at Parking field.

It can be inferred that parking policy planning has done well by Dishubkominfo where management of the general curb parking in the area of Simpang Lima refer to Perda No. 1 of 2004 on the Organization of the Public Street Parking and Perda No. 2 in 2012 about Retribution. However in the management field encountered obstacles in terms of less socializing, given behavior of interpreter that parking is not orderly, and existence of barriers to benefit of the field coordinator who feel have parking lots. Parking management is ultimately ineffective in the field have an impact on the acceptance of the absorption area of the parking sector is evidenced by the realizable target achievement never budget public curbside parking levy.

Finally with this research expected street parking management improvements to achieve order and local revenue from the parking sector.

Keywords: Parking Management, Order , Acceptance Region

1. Pendahuluan

Kawasan Simpang Lima dijadikan sebagai salah satu tempat hiburan dan rekreasi bagi masyarakat lokal maupun pendatang. Simpang Lima sebagai suatu pusat kota yang mempertemukan jalan-jalan arteri menjadikan kawasan ini menjadi titik pusat pertemuan arus kendaraan. Kawasan Simpang Lima Semarang juga merupakan titik pertemuan antar berbagai cabang jalan, yang dimana cabang-cabang jalan ini dipenuhi oleh pusat pemerintahan yang berada di Jalan Pahlawan, pusat oleh-oleh dan pusat perkantoran yang berada di Jalan Pandanaran, dan juga pusat perbelanjaan, pertokoan, dan hotel yang berada di sepanjang Jalan Gajah Mada, Ahmad Yani, dan Ahmad Dahlan. Simpang Lima sebagai tempat hiburan dan rekreasi serta sebagai kawasan pertemuan antara berbagai jalan, menjadikan Simpang Lima menjadi kawasan yang padat.

Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota memberikan pengaruh terhadap tarikan lalu lintas kendaraan bermotor yang besar dari wilayah-wilayah sekitarnya. Akibatnya, banyak pengunjung yang menggunakan kendaraan dengan berbagai kepentingan, berkonsentrasi dengan menggunakan tempat parkir di dalamnya, terutama parkir di sisi jalan (*on street parking*). Parkir *on street* merupakan parkir di tepi jalan umum, sedangkan parkir *off street* merupakan parkir di luar jalan yakni di gedung parkir. Dalam Pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kawasan Simpang Lima, Dishubkominfo mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum dan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum terkait retribusi parkir.

Pada kawasan Simpang Lima telah dijelaskan bahwa jalan pada kawasan ini masuk dalam kategori jalan Provinsi yang mana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 43 UU No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa jalan tersebut dilarang digunakan untuk aktivitas parkir, namun karena padatnya aktivitas di kawasan Simpang Lima menyebabkan banyaknya kegiatan parkir hingga menimbulkan praktek parkir liar. Munculnya praktek parkir liar karena pemanfaatan gedung parkir yang tidak optimal. Hal ini tentu saja mempengaruhi kesemrawutan lalu lintas di kawasan Simpang Lima.

Beberapa masalah terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima diantaranya banyaknya parkir liar yang disebabkan karena banyaknya para karyawan mall dan pengunjung yang lebih memilih parkir di luar (tepi jalan) dibandingkan di dalam mall dikarenakan tarif parkir di dalam mall yang lebih mahal karena menggunakan tarif per jam (tarif progresif), penarikan tarif parkir yang melampaui regulasi, banyaknya para juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir pada Dishubkominfo dan adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir. Berbagai hambatan dalam pengelolaan parkir di kawasan Simpang Lima berdampak pada sumbangsih terhadap PAD Kota Semarang, menjadi penghambat daerah dalam mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan target. Padahal sektor parkir merupakan potensi pendapatan yang besar di daerah perkotaan.

2. Teori dan Metode Penelitian

2.1 Teori

Pada penelitian evaluasi terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima Kota Semarang ini, fokus penelitiannya adalah pada pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kawasan Simpang Lima serta pengaruhnya terhadap PAD Kota Semarang dari pos retribusi parkir. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori Manajemen Pemerintahan oleh Samuel E. Overman mengenai penerapan fungsi manajemen dengan paradigma manajemen publik yang baru yang dipengaruhi beberapa aspek.

Samuel E. Overman mengartikan manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *Planning*, *Organizing*, dan *Controlling* di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain¹. Samuel E. Overman dan G. David Garson pada tahun 1983 menggagas konsep manajemen publik baru dengan model PAFHRIER, menggeser paradigma manajemen publik lama. Adapun penjabaran model PAFHRIER adalah sebagai berikut:

1. Policy Analysis
Merupakan pengembangan lanjut dari planning dan reporting. Seorang manajer dituntut mampu melakukan analisis kebijakan publik.
2. Financial Management
Adalah pengembangan dari budgeting. Manajer dituntut mampu mengatur anggaran.
3. Human Resources Management
Adalah pengembangan dari staffing. Manajer dituntut paling tidak memperhatikan 3 hal pokok,
Pertama, bagaimana memperoleh sumberdaya manusia dalam jumlah dan kualitas yang tepat.
Kedua, bagaimana meningkatkan kualitas kerja pegawai.
Ketiga, bagaimana pemimpin mengendalikan mereka sesuai dg tujuan organisasi.
4. Information Management
Adalah pengembangan dari reporting , directing, dan coordinating.
Manajer dituntut mampu mengelola data dan informasi bagi kebutuhan perencanaan, pengambilan keputusan, penilaian pekerjaan, sistem monitoring dan pengendalian.
5. External Relation
Merupakan fungsi baru. Manajer harus mampu menjaga hubungan luar atau dengan lingkungannya.

manajemen pemerintahan menurut Samuel E. Overman dimana dalam suatu pengelolaan, terdapat aspek organisasi yang dalam hal ini bersangkutan dengan organisasi yang memiliki wewenang dalam

¹ Yeremias T. Keban. 2014. "*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*" Yogyakarta: Gava Media. Hlm 13

pengelolaan parkir yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Dalam manajemen pemerintahan menurut Overman adanya aspek penentuan sumber daya yakni pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perparkiran. Dalam hal aspek keuangan yaitu adanya target retribusi parkir yang masuk ke dalam PAD. Dalam hal aspek fisik dan informasi, pengelola perparkiran mengidentifikasi potensi-potensi titik parkir yang ada dan disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal aspek politik dimana dalam pengelolaan parkir yang terkadang menemui hambatan kepentingan dari lingkungan eksternal yakni kepentingan aktor informal.

2.2 Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian campuran atau gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian campuran ini menggunakan pendekatan desain dominan-kurang dominan yang diungkapkan oleh Creswell yakni pendekatan ini menggunakan gabungan pada prosedur penelitian, tetapi salah satu metode lebih dominan terhadap metode yang lain dengan tipe penelitian deskriptif². Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi pengelolaan parkir tepi jalan umum kawasan Simpang Lima, bagaimana peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir, dan hambatan apa saja yang mempengaruhi pengelolaan tersebut akan disoroti dalam penelitian ini.

Adapun Objek Penelitian ini adalah Dishubkominfo ota Semarang, Komisi B DPRD Kota Semarang, Juru Parkir, dan Pemilik Lahan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menggunakan bentuk interview kurang terstruktur, dengan membuat interview guide berisikan topik- topik yang ditanyakan kemudian dielaborasi. Interview guide diturunkan dari logika berfikir yang dibangun dalam penelitian ini. Pemilihan responden dengan menggunakan teknik *snowball effect*. Mewawancarai responden pertama kemudian melakukan interview dengan responden lain yang berkaitan dengan responden pertama, dan seterusnya.

2. Observasi

Merupakan pengamatan secara langsung di lapangan terkait dengan pengelolaan perparkiran di kawasan Simpang Lima Semarang oleh aktor formal yakni para juru parkir yang terdaftar dalam Dishubkominfo dan juga praktik parkir liar oleh aktor

² John W Creswell. 2001 “*Research Design*” Jakarta:KIK Press. hlm 43

informal yakni para juru parkir yang tidak terdaftar. Pengamatan di lapangan ini guna melihat praktik parkir di kawasan Simpang Lima Semarang yang berjejer di sepanjang jalan utama. Selain itu pula dilakukan observasi kepada Dishubkominfo terkait kebijakan pengelolaan perparkiran yang seharusnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, klipng, artikel. Rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, data survei, dan daftar nama. Dalam penelitian ini mencari dokumen berupa Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kota Semarang dan juga laporan realisasi anggaran retribusi parkir Kota Semarang. Selain itu pula berisikan dokumentasi hasil observasi di lapangan dan perekaman hasil wawancara.

3. Hasil Penelitian

3.1 Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima

Manajemen atau pengelolaan parkir di dalam badan jalan (*on street parking*) merupakan hal penting untuk mengendalikan lalu lintas agar kemacetan dapat ditekan. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan dalam proses pengelolaan parkir yang meliputi:

1. Perencanaan

Adapun pengelolaan parkir di Kawasan Simpang Lima saat ini memiliki dua tujuan utama yakni terkait dengan penyelenggaraan parkir yang efektif guna tercapainya ketertiban lalu lintas jalan dan tujuan lainnya adalah optimalnya penerimaan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum ini yang akan masuk kedalam pos PAD. Pengejawantahan tujuan pengelolaan parkir dijalankan melalui strategi kebijakan dimana Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan parkir dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi parkir tepi jalan umum.

2. Pengorganisasian

a. Penentuan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan parkir ini adalah Dishubkominfo Kota Semarang selaku pelaksana kebijakan, DPRD Kota Semarang selaku partner lembaga Disubkominfo dalam menetapkan kebijakan, Juru

Parkir selaku pengelola parkir di lapangan, dan Koordinator Lapangan selaku pemilik lahan.

b. Sosialisasi Kebijakan

Selanjutnya dilakukan sosialisasi kebijakan yang telah dihasilkan demi tercapainya suatu penyampaian komunikasi yang tepat sasaran dan tepat tujuan. Juru parkir (Jukir) dan Koordinator Lapangan (Korlap) kurang diberikan informasi kebijakan tentang Peraturan Daerah oleh Unit Pengelolaan Perparkiran. Kurang diberikan informasi tersebut terlihat dari adanya pertemuan sosialisasi tentang peraturan daerah parkir tepi jalan umum tersebut kepada para Juru Parkir (Jukir) hanya berlangsung dua kali pada Maret 2004 dan Januari 2005 setelah diundangkan pada Februari 2004. Para juru parkir juga beranggapan bahwa sebagai akibat tidak memiliki buku peraturan mengenai peraturan perparkiran membuat para juru parkir tidak memiliki gambaran jelas terkait isi peraturan daerah tersebut. Terkait perubahan tarif parkir yang tertuang dalam Perda No.2 Tahun 2012 bahwa sosialisasi yang dilakukan Dishubkominfo adalah hanya melalui karcis parkir yang diberikan kepada para juru parkir

c. Mekanisme Penarikan Retribusi

Proses pemungutan retribusi adalah sebagai berikut: juru parkir memungut retribusi parkir di tempat mereka beroperasi, lalu pengumpul yang direkrut oleh Dishub akan menarik setoran dari juru parkir di kawasan operasi tersebut, kemudian pengumpul akan menyetor uang retribusi kepada bendahara dinas, dan akhirnya dari bendahara lalu disetor ke kas daerah. Kendala dalam proses penarikan retribusi adalah dimana setoran menyesuaikan dengan pendapatan juru parkir, waktu penarikan setoran yang kurang tepat, liburinya juru parkir yang menyesuaikan toko yang tutup dan faktor cuaca.

d. Praktek Perparkiran

Dishubkominfo telah memberi rambu lalu lintas dan marka pada titik-titik jalan yang dilarang untuk aktivitas parkir. Banyaknya para juru parkir yang tidak mematuhi aturan rambu-rambu larangan parkir, banyaknya praktik parkir liar di beberapa titik larangan di kawasan Simpang Lima, banyaknya para juru parkir yang menarik retribusi diatas tarif yang ditentukan, bahkan juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi pada Dishubkominfo. Pengelolaan parkir di lapangan juga menemui kendala karena adanya

kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir.

3. Pengendalian

Dalam melakukan pengendalian terhadap pengelolaan parkir agar tujuan pengelolaan dapat tercapai, Dishubkominfo bekerja sama dengan kepolisian dalam melakukan penindakan parkir liar dimana para pelaku parkir liar ini akan mendapatkan sanksi penilangan dan denda, namun upaya pengendalian ini masih dianggap terlalu lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera. Adapun untuk para juru parkir terdaftar yang tidak mengikuti prosedur perparkiran hanya dikenakan sanksi berupa ancaman pencabutan izin parkir setelah mendapat surat peringatan. Hal ini nyatanya kurang berjalan efektif karena pengawasan yang belum maksimal oleh Dishubkominfo.

3.2 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Parkir di Kawasan Simpang Lima

Dalam proses pengimplementasian kebijakan parkir tepi jalan umum, adapun pihak-pihak yang berperan diantaranya adalah:

- Dishubkominfo sebagai SKPD yang menaungi urusan perparkiran dan mengatur jalannya kebijakan pengelolaan parkir yang menemui hambatan berupa tidak tertibnya para juru parkir dan menemui kendala kepentingan dengan para pemilik lahan.
- Komisi B DPRD Kota Semarang sebagai pemegang fungsi check and balances dalam formasi kelembagaan pemerintah yang melakukan evaluasi RAPBD untuk kemudian disetujui dalam APBD dan fungsi pengawasan kebijakan
- Juru parkir yang melaksanakan praktek perparkiran di lapangan. Dimana terdapat aturan dan prosedur mengenai pengelolaan parkir tepi jalan umum bagi para juru parkir tersebut yang dimana dalam pengelolaan di lapangan banyak menemui hambatan dimana komunikasi dan arahan dari Dishubkominfo yang kurang intensif, dan juga kepentingan para pemilik lahan parkir membuat para juru parkir merasa hanya perlu memberikan setoran kepada para pemilik lahan ini dan juga perilaku para juru parkir yang tidak tertib.
- Koordinator lapangan atau juga dapat disebut pemilik lahan merupakan aktor di luar sistem yang terkadang merasa berkuasa atas suatu lahan parkir sehingga membuat para juru parkir memberikan setoran kepada para pemilik lahan ini. Para koordinator lapangan ini juga merasa kepentingan mereka tidak terkoordinir dalam pengaturan mengenai pengelolaan perparkiran sehingga menyebabkan adanya perlawanan kepada pengaturan Dishubkominfo.

3.3 Faktor-Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Perparkiran di Kawasan Simpang Lima

1. Peraturan: Perda Parkir yang belum mengakomodasi kepentingan semua pihak dan belum adanya kewajiban dan hak juru parkir.
2. Tujuan Ketertiban: belum tersedianya Perda LLAJ yang spesifik tentang hukuman bagi para pelaku parkir liar, masih minimnya denda parkir sehingga kurang memberikan efek jera, kewenangan penilangan oleh Dishubkominfo yang masih terbatas, kurangnya penyediaan kantong parkir off street, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya pada kantong parkir yang telah disediakan.
3. Tujuan Penerimaan Daerah: pemilik lahan parkir yang belum dapat diajak berkoordinasi, masih adanya titik parkir yang belum tertangani, terdapat baking oknum tertentu pada kegiatan parkir liar, setoran retribusi parkir yang bergantung pada cuaca dan bervariasinya jumlah potensi titik parkir.
4. Pelaksana parkir di lapangan: beragamnya usia dan latar pendidikan membuat sosialisasi kebijakan menjadi sulit dalam proses penerjemahannya, kurangnya pembinaan teknis kepada para juru parkir, selain itu juga adanya tekanan dari pihak lain yakni kinerja yang masih bergantung pada pemilik lahan, setoran retribusi masih bergantung cuaca, dan proses penggantian juru parkir nakal yang tidak mudah.

4. Simpulan

Pelaksanaan pengelolaan parkir oleh Dishubkominfo berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tepi Jalan Umum dan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum adalah guna mencapai tujuan ketertiban dan tercapainya penerimaan daerah. Dalam proses perencanaan telah dilakukan dengan baik oleh Dishubkominfo sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan parkir. Namun realisasi kebijakan di lapangan nyatanya banyak yang tak sesuai dengan aturan pengelolaan parkir yang tertuang dalam Perda. Banyaknya perilaku para juru parkir yang tidak tertib yakni melakukan parkir di daerah larangan sehingga menimbulkan parkir liar, banyaknya para juru parkir yang tidak melakukan penarikan retribusi sesuai tarif, banyaknya para juru parkir yang bahkan tidak mensetorkan retribusi parkir kepada Dishubkominfo.

Nyatanya permasalahan di lapangan juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dishubkominfo kepada juru parkir sehingga pelaksana parkir di lapangan tidak memiliki gambaran jelas terkait peraturan, selain itu adanya peran koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan yang bertindak sewenang-wenang sehingga para juru parkir menyetorkan retribusi parkir justru kepada para korlap ini. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan parkir ini berdampak pada pemasukan daerah dari sektor parkir, dimana realisasi penerimaan retribusi parkir tak pernah mencapai target.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Jaringan Transportasi: Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Creswell, John. W. 2001. *Research Design*. Jakarta: KIK Press
- Herujito, Yayat. M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo
- Kantaprawira, Rusadi. 1990. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensido
- Keban, Yeremias. T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Merriam, Charles. 1957. *Systematics Politics*. Chicago: University of Chicago Press
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sastrohadiwiryono, Siswanto. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Suradinata, Ermaya. 2004. *Manajemen Pemerintahan dalam Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Ramadhan
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Revika Aditama
- Terry, George. R dan Laslie W. Rue. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara

Dokumen

- Data Juru Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang, Dokumen Dishubkominfo
- Dokumen Pengelolaan Parkir Dishubkominfo Kota Semarang
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jurnal

- Abdul Kadir Karding, "Evaluasi Pelaksanaan Program BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Semarang" Tesis S-2 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNDIP, 2008, hlm 47
- Dini Tri Haryanti, ST, "Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang" Tesis S-2 Teknik

- Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, UNDIP, 2008, hlm 70
- Markus' Maxs Enembe, "*Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang*" Tesis S-2 Administrasi Publik, UNDIP, 2006, hlm 11-14
- Mustofa, "*Pelaksanaan Intensifikasi Retribusi Parkir Dalam Menunjang Otonomi Daerah*" Skripsi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNNES, 2009, hlm 73

Website

- Dokumen Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, diakses dari www.pu.go.id, pada tanggal 28 Juni 2016, pukul 05.30 WIB
- Dokumen Renstra Dishubkominfo Kota Semarang, diakses dari beta.semarangkota.go.id, pada tanggal 12 Juni 2016 pukul 04.40 WIB
- Laporan Realisasi Anggaran per Urusan SKPD Tahun 2012, dokumen diakses dari birokeuangan.jatengprov.go.id
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dishubkominfo Kota Semarang, diakses dari beta.semarangkota.go.id, pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 13.58
- Aan Rizdan, "*Alun-alun Simpang Lima Kota Semarang*" diakses dari www.semarangplus.com, pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 15.42 WIB
- Ani Suyatni, "*Mal di Sekitar Simpang Lima Tambah Lahan Parkir*", 2013, diakses dari jateng.tribunnews.com, pada tanggal 4 April 2016 pukul 13.50 WIB
- Imania Bidari, "*Makalah Penelitian Studi Kasus*" 2014, diakses dari www.academia.edu, pada tanggal 4 April 2016 pukul 22.03
- Kepala Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang, "*Lhaiske, Pelaku Parkir Liar Bakal Didenda Rp.500 ribu*", 2014, diakses dari metrosemarang.com, pada tanggal 29 Juni 2016, pukul 23.22 WIB
- Kepala Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang, "*Pemkot Semarang Kurang Tegas Parkir Liar Hasilkan Rp.1,4 Miliar*", 2013, diakses dari indenpers-media.co.id, pada tanggal 29 Juni 2016, pukul 11.12 WIB
- Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa, "*Pendapatan PKB Capai Rp 39,64 M*" diakses dari radarsemarang.com, pada 16 Februari 2016, pukul 16.06 WIB
- Kepala Dishubkominfo Kota Semarang, "*Kawasan Parkir Dibagi Empat Zona, Shuttle Bus Pekunden-Pandanaran Siap*", 2014, diakses dari

- dinhubkominfo.jatengprov.go.id, pada tanggal 29 Juni 2016, Pukul 10.00 WIB
- Muhammad Rifai Jamuz, “*Retribusi Parkir Bocor; Lemahnya Penegakan Perda*” diakses dari Kabarjateng.com, pada 16 Februari 2016, pukul 16.30 WIB
- Nur Istibsaroh, “*Disorot, Lemahnya Penegakan PERDA Parkir di Semarang*”, 2013, Diakses dari AntaraJateng.com, pada tanggal 19 Juni 2015 pukul 10.17 WIB
- Sadu Wasistiono, “*Manajemen Pemerintahan*”, 2015, diakses dari saduwasistiono.ipdn.ac.id, pada 17 Februari 2016, pukul 16.10 WIB
- Sadu, Wasistiono, “*Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik*”, diakses dari <http://dosen.uta45jakarta.ac.id>, pada tanggal 14 Februari 2016 pukul 10.47 WIB